

FORMAT REVISI SOAL ASESMEN

Nama : ADE CHANDRA, S.Pd
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Asal Sekolah : SMK Negeri 4 Meulaboh
Kelas / Fase : XI,XII /E,F

A. Tujuan Lembar Kerja

Setelah mengisi LK ini, guru mampu:

1. Menganalisis keselarasan TP, kompetensi TKA, dan asesmen.
2. Mengidentifikasi kelemahan soal berdasarkan kaidah soal tes terstandar.
3. Merevisi soal agar lebih kontekstual, berbasis penalaran, dan sesuai kompetensi TKA.
4. Mengembangkan soal yang mendukung HOTS, literasi, dan numerasi.
5. Menyusun soal yang lebih siap mendukung keberhasilan siswa dalam TKA.

B. Petunjuk Kerja:

Waktu: ±30 menit (individu atau berpasangan)

1. Cermati kembali soal dari TP di LK 2 termasuk analisis gap dan tindak lanjutnya.
2. Tuliskan soal tersebut pada kolom "Soal Sebelum Revisi".
3. Tuliskan kembali tindak lanjut dari hasil analisis gap dari LK2 pada kolom "Rekomendasi Hasil Analisis". Tambahkan hasil analisis kaidah penyusunan soal terstandar dan HOTS dengan menggunakan instrumen analisis kualitatif butir soal dengan menggunakan instrumen pada tautan berikut <https://s.id/instrumenAnalisisSoal> . (substansi, konstruksi, dan bahasa)
4. Revisi soal-soal tersebut sesuai hasil rekomendasi.
6. Tuliskan hasil revisi pada kolom "Soal Setelah Revisi".
7. Lakukan refleksi setelah seluruh tabel selesai diisi.

C. Petunjuk Penyimpanan dan Unggah LK:

1. Unduh terlebih dahulu
2. Simpan dengan penamaan:
Provinsi_Nama Sekolah_Mata Pelajaran_Nama Guru
DKI Jakarta_SMA Negeri 68 Jakarta_Matematika_Susilo
3. Unggah pada gform yang telah disediakan

No	Soal Sebelum Revisi (diisi dengan soal pada TP di LK 2)	Rekomendasi Hasil Analisis (diisi dengan hasil tindak lanjut analisis gap di LK 2)	Soal Setelah Revisi
1	Perhatikan tindakan berikut! 1. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian. 2. Mengikuti musyawarah dengan menghargai pendapat semua peserta. 3. Menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. 4. Menolak teman karena berasal dari suku yang berbeda. 5. Berkolaborasi dalam kegiatan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Tindakan yang mendukung terwujudnya harmoni dalam keberagaman adalah A. 1, 2, dan 4 B. 2, 3, dan 5 C. 1, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 1, 2, dan 5	Identifikasi Gap Tidak menggunakan stimulus kontekstual, hanya daftar tindakan. Soal belum sepenuhnya HOTS karena tidak menuntut analisis terhadap suatu permasalahan. Tindak lanjut: 1. Tambahkan ilustrasi atau kasus nyata sebelum daftar tindakan, misalnya kegiatan gotong royong lintas suku atau konflik akibat intoleransi. 2. Tambahkan konteks pada Soal bahwa perilaku tersebut berkontribusi terhadap persatuan dan pembangunan nasional. 3. Gunakan konteks yang serupa, misalnya lingkungan sekolah, masyarakat, atau media sosial. 4. Ubah menjadi studi kasus sehingga peserta didik harus menganalisis situasi sebelum menentukan jawaban.	Pemerintah daerah bersama masyarakat membangun sebuah kawasan wisata berbasis budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya bekerja sama dalam perencanaan, pembangunan, hingga promosi wisata. Namun, muncul sekelompok orang yang menolak keterlibatan masyarakat dari suku lain dengan alasan hanya budaya setempat yang berhak dikembangkan. Akibatnya, sempat terjadi perbedaan pendapat yang menghambat proses pembangunan. Melalui musyawarah, tokoh masyarakat menjelaskan pentingnya menghargai keberagaman sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama sehingga pembangunan dapat kembali berjalan dengan baik. Soal Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang menunjukkan penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal pembangunan nasional adalah Pilih semua jawaban yang benar!

			☐ A. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai kekuatan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. ☐ B. Memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa membedakan latar belakang. ☐ C. Membatasi keterlibatan masyarakat dari kelompok tertentu agar budaya daerah tetap terjaga. ☐ D. Menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. ☐ E. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
2		Secara materi sudah selaras karena keduanya mengacu pada TP, tetapi cakupan materi berbeda sehingga belum mengukur kompetensi yang sama. Tindak lanjut: 1. Tentukan fokus asesmen, misalnya jika ingin mengukur penegakan hukum dan HAM, kedua soal sebaiknya berada	Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengelolaan sampah nasional untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah daerah menyusun peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing serta mengajak masyarakat mengikuti musyawarah untuk menentukan lokasi tempat pengolahan sampah. Sebagian warga menyampaikan pendapat secara tertib dalam forum musyawarah, sedangkan sebagian lainnya melakukan penyebaran informasi yang tidak

		pada materi tersebut atau dibuat sebagai paket yang jelas mewakili beberapa indikator TP. ❓ Menyusun blueprint asesmen yang memetakan setiap soal dengan indikator pembelajaran agar jelas bahwa setiap soal mengukur aspek yang berbeda dari tujuan pembelajaran secara proporsional. ❓ Menggunakan stimulus kontekstual pada semua soal sehingga karakteristik asesmen TKA tetap konsisten dan mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi.	benar melalui media sosial sehingga memicu penolakan terhadap program tersebut. Soal Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Pilih semua jawaban yang benar! ☐ A. Pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kondisi daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ☐ B. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah dan menghormati hasil keputusan yang telah disepakati bersama. ☐ C. Pemerintah daerah dapat mengabaikan kebijakan pemerintah pusat apabila terdapat perbedaan kepentingan di daerah. ☐ D. Penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. ☐ E. Masyarakat berhak menolak seluruh kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.